

nawaja

Edisi 08, Vol.09

Jakarta di Ambang Revolusi 1945

Jurnal Integritas:

- Inovasi kebijakan kepala daerah dari jalur perseorangan
- Modus operandi korupsi pada masa pertumbuhan pertambangan nikel di Sulawesi Tengah: Perspektif 'Elite Capture'

Koleksi Buku Bulan Ini:

- *Peninjauan Kembali dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*
- *Asas Nemo Judex in Causa Sua dalam Pengujian Undang-Undang*
- *Perbandingan Hukum : Antara Disiplin Ilmu dan Metodologi*
- *Kompilasi Konstitusi Sedunia*
- *Politik Hukum Kewarganegaraan Ganda*
- *Hukum Pemasyarakatan di Indonesia*

Perpustakaan Gedung Merah Putih KPK
Lt. 1, Jalan Kuningan Persada
Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950

Perpustakaan Gedung Pusat Pelatihan Antikorupsi KPK
Lt. 4, Jalan Haji R. Rasuna Said
Kav. C1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940

Jakarta di Ambang Revolusi 1945

Resensi Buku "Djakarta 1945: Awal Revolusi Kemerdekaan"

Pada tahun 1945, Jakarta menjadi saksi revolusi kemerdekaan Indonesia, dengan semangat perjuangan yang membara di setiap sudut kota. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada bulan Agustus, kekosongan kekuasaan memberi kesempatan bagi pemuda dan tokoh nasionalis untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Sebagai pusat pemerintahan dan kota terbesar di Nusantara, Jakarta menjadi titik fokus pergerakan revolusi. Peristiwa-peristiwa penting, seperti rapat akbar di Lapangan Ikada yang dihadiri ribuan rakyat Indonesia untuk mendukung kemerdekaan, mencerminkan suasana kota yang dipenuhi antusiasme dan harapan. Di tengah kekacauan, konflik bersenjata antara pemuda Indonesia dengan tentara Jepang dan sekutu Belanda mulai terjadi, menandai awal perjuangan panjang untuk mempertahankan kemerdekaan. Jakarta 1945 adalah simbol keberanian dan tekad bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu kolonialisme dan meraih kemerdekaan yang sejati.

Dalam suasana yang penuh gejolak, berbagai organisasi pemuda dan kelompok perlawanan mulai terbentuk, menggalang kekuatan dan mengatur strategi untuk mengusir penjajah. Kondisi di Jakarta pada masa itu dipenuhi dengan ketidakpastian, risiko, namun juga dipenuhi dengan harapan dan optimisme. Membawa tantangan baru, baik dari ancaman militer maupun dari tekanan ekonomi dan sosial. Meski demikian, semangat persatuan dan keinginan untuk merdeka tetap menjadi pendorong utama bagi semua lapisan masyarakat. Jakarta 1945 bukan hanya sekadar latar belakang sejarah, tetapi juga menjadi simbol perjuangan dan pengorbanan yang mewarnai perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

Djakarta 1945: Awal Revolusi Kemerdekaan adalah karya Julius Pour yang memberikan pandangan mendalam tentang Jakarta selama masa



revolusi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Menggambarkan bagaimana Jakarta, sebagai ibu kota menjadi pusat berbagai peristiwa penting yang berperan dalam perjalanan bangsa menuju kemerdekaan. Penulis memberikan penjelasan rinci mengenai peristiwa proklamasi pada 17 Agustus 1945 dan peristiwa penting lainnya seperti penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok.

Buku ini juga menunjukkan bagaimana para pemuda dan tokoh nasionalis memanfaatkan momentum tersebut untuk menggalang dukungan dan memperkuat tekad rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Penulis melakukan penelitian yang komprehensif dengan mengumpulkan berbagai sumber primer dan sekunder untuk menyusun narasi yang informatif, tidak hanya berfokus pada aspek politik dan militer, tetapi juga menyoroti aspek sosial dan budaya. Juga memberikan pandangan yang lebih utuh tentang Jakarta pada masa revolusi. Penasaran dengan isi buku ini? Temukan segera di Perpustakaan KPK.

Penulis : Julius Pour
Penerbit : PT Bhuana Ilmu Populer
Tahun Terbit : 2013
Tebal Buku : 463

Vol.9 No.1, Tahun 2023

Inovasi kebijakan kepala daerah dari jalur perseorangan

Policy Innovation Towards Regional Heads Who Nominate as Independent Candidate



Artikel ini berangkat dari fenomena pasangan calon kepala daerah yang maju dan menang melalui jalur perseorangan dalam Pilkada. Kehadiran kepala daerah perseorangan perlu diuji khususnya dalam membangun pemerintahan yang bebas korupsi. Penulis mengambil kasus rekrutmen pejabat eselon pemerintah daerah mengingat disektor tersebut sangat rentan korupsi. Penelitian dilakukan di dua daerah yang pernah dan sedang dijabat kepala daerah dari jalur perseorangan yakni Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Metode penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa wawancara mendalam ke banyak pihak, studi kepustakaan, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, praktik jual-beli jabatan yang acapkali terjadi pada banyak daerah, justru tidak ditemukan di kedua daerah. Kepala daerah dari jalur perseorangan berhasil melakukan inovasi kebijakan dengan tidak banyak mengintervensi dan menyerahkan sepenuhnya mekanisme proses rekrutmen pejabat eselon sesuai aturan. Jikapun perubahan dilakukan, sifatnya tidak frontal dan selalu mengedepankan prinsip meritokrasi. Hal ini dengan sendirinya memunculkan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, eksistensi kepala daerah perseorangan terbukti linear dengan agenda pencegahan korupsi. Meskipun demikian, kepala daerah dari jalur perseorangan tetap memerlukan penguatan seperti dukungan pendanaan negara dalam Pilkada, afirmasi persyaratan, dan pengaturan yang lebih inklusif.

Modus operandi korupsi pada masa pertumbuhan pertambangan nikel di Sulawesi Tengah: Perspektif 'Elite Capture'

The modus operandi of corruption during the growing period of nickel mining in Central Sulawesi: An 'Elite Capture' perspective



Tujuan artikel ini adalah menjelaskan modus operandi korupsi dan mengidentifikasi potensi kerugian negara akibat korupsi pada sektor pertambangan nikel di Sulawesi Tengah. Teori *elite capture* yang memfokuskan pada perampasan sumber daya alam oleh elit politik dan ekonomi, digunakan sebagai kerangka analisis dalam artikel ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan studi lapangan. Untuk mengidentifikasi posisi dan relasi aktor dalam bisnis pertambangan nikel digunakan metode *social network analysis* (SNA) dengan bantuan *software* ghepi. Hasil penelitian ini menemukan aktor-aktor yang terkait dalam bisnis pertambangan nikel berasal dari latar belakang beragam yang terdiri dari politisi, pengusaha, birokrat, pejabat pemerintah pusat, pejabat daerah, oknum militer dan aparat penegak hukum. Jaringan relasi antar aktor teridentifikasi dalam lima bentuk/pola, yaitu jaringan bisnis, jaringan keluarga, jaringan partai, jaringan pemerintah dan jaringan organisasi massa (sosial dan agama). Modus operandi para aktor dan elit untuk memperoleh konsesi tambang nikel di Sulawesi Tengah melalui jual beli dan sewa lahan, pengajuan pendapat hukum, jual beli dokumen, *rent extraction*, *shadow beneficial ownership* dan penambangan ilegal. Estimasi potensi kerugian negara akibat korupsi di sektor pertambangan sejak pertumbuhan nikel di Sulawesi Tengah tahun 2011 hingga tahun 2021 diperkirakan mencapai kurang lebih 100 milyar US\$. Penelitian ini menemukan kebaruan, bahwa *elite capture* tidak hanya diwujudkan melalui suap (korupsi), namun juga melalui intimidasi dan kerja sama bisnis.

Koleksi Bulan Ini!

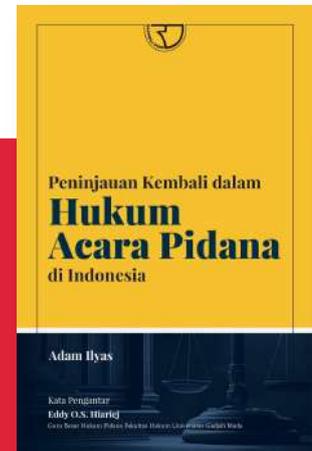


nawala

Peninjauan Kembali dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Merupakan sebuah karya yang membahas secara komprehensif mengenai peninjauan kembali dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia.

01



Asas *Nemo Judex in Causa Sua* dalam Pengujian Undang-Undang.

Menyajikan kajian tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi memosisikan diri ketika menghadapi benturan kepentingan dalam menangani perkara pengujian undang-undang.

02



Perbandingan Hukum : Antara Disiplin Ilmu dan Metodologi

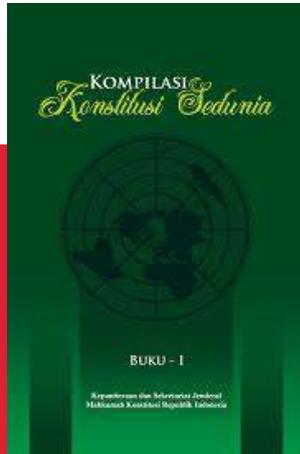
Menguraikan perbandingan hukum dalam perspektif ilmu dan metodologi juga mengulas ilmu perbandingan hukum klasik.

03





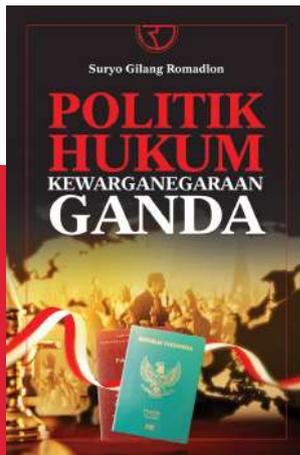
04



Kompilasi Konstitusi Sedunia

Mendesripsikan tentang kompilasi konstitusi dari berbagai negara untuk *comparative study*. Mulai dari sejarah, tujuan negara, ideologi, sistem pemerintahan, kelembagaan negara dan intensi penghormatan terhadap HAM.

05



Politik Hukum Kewarganegaraan Ganda

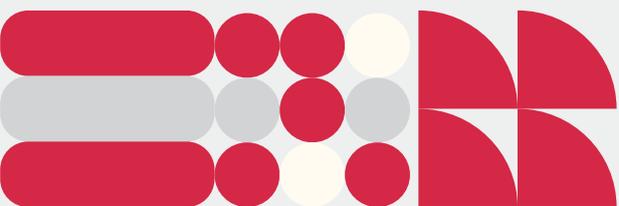
Memberikan gambaran mengenai persoalan kewarganegaraan ganda di Indonesia sebagai isu kontemporer yang sedang ramai didiskusikan di berbagai forum.

06



Hukum Pemasarakatan di Indonesia

Mengupas secara mendalam mengenai sistem pemasarakatan di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.



nawaja

Edisi 08, Vol.09

Yuk Berkunjung ke Perpustakaan KPK
Scan untuk informasi lebih lanjut

